

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk landasan teori dan acuan dalam memecahkan masalah baru yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nourma Amalia (2014)	Penerapan Laporan Keuangan Akuntansi Organisasi Nirlaba: “Sesuai PSAK No 45 atau Tidak?”(Studi Kasus Pada Ponpes Darul Falah Bangsri Jepara)	Kualitatif deskriptif dan metode komparatif	Pelaporan keuangan akuntansi nirlaba belum sesuai dengan standart PSAK 45 karena tidak sepenuhnya menerapkan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
2	Teguh Kristanti Laksmi Bestari (2015)	Penerapan PSAK No.45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Himmatun Ayat Surabaya	Kualitatif deskriptif	Yayasan Himmatun Ayat Surabaya belum menggunakan PSAK 45 dan belum dapat sepenuhnya diterapkan pada Yayasan tersebut, karena terdapat kendala sumber daya manusia yang masih dalam

				proses pemahaman tentang laporan keuangan, sehingga penerapan yang dilakukan harus dengan proses yang cukup lama.
3	Susiani (2015)	Implementasi PSAK No.45 Pada Yayasan Pendidikan Muslimah Indonesia Al-Izzah Batu	Kualitatif deskriptif	Yayasan Pendidikan Muslimah Indonesia Al-Izzah Batu belum mengimplementasikan PSAK No.45 pada laporan keuangannya, laporan keuangan yang disajikan Yayasan Pendidikan Muslimah Al-Izzah Batu terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, dan laporan keuangannya dibuat dengan program zahir accounting.
4	Mailany Akhaddiyah Heriyati (2015)	Evaluasi Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 Pada Panti Asuhan Muhamadiyah Malang	Kualitatif deskriptif	Dalam penyajian laporan keuangan PAM Malang belum secara keseluruhan menerapkan sesuai dengan PSAK 45 yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan periode Desember 2015 yang dipublikasi tidak

				terdapat unsur-unsur tersebut, adapun pada laporan keuangan internal telah terdapat neraca lajur, neraca, serta laporan arus kas, tetapi untuk laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan belum ada.
5	Moh Farih Zamroni (2015)	Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Perspektif PSAK Nomor 45 di Yayasan Darul Mustaghitsin	Kualitatif deskriptif	Terdapat komponen laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standart yang berlaku umum bahkan belum tersajikan
6	Mohammad Fatih (2015)	Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Nirlaba Berdasarkan PSAK 45 (Studi Kasus Pada Yayasan Pesantren Global	Kualitatif deskriptif	Terdapat komponen laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standart yang berlaku umum bahkan belum tersajikan.

		Tarbiyyatul Arifin Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)		
7	Sri Wahyuni (2016)	Evaluasi Implementasi Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Panti Asuhan “Mandhani Siwi” PKU Muhammdiyah Purbalingga)	Kualitatif deskriptif	Laporan keuangan yang disusun oleh pihak panti asuhan “Mandhani Siwi” PKU Muhammadiyah Purbalingga hanya memuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan yang dibuat oleh panti asuhan belum sesuai dengan PSAK 45.
8	Musthafa Firas Muhtadi (2016)	Penerapan PSAK No.45 Pada Penyajian Laporan Keuangan Yayasan	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	PSAK No.45 tidak digunakan sebagai standart dan metode penyajian laporan keuangan objek penelitian, beberapa informasi keuangan juga

		Pondok Pesantren Ilmu dan Teknologi As-Salam		belum diungkap dan dipisahkan sesuai dengan sifatnya.
9	Dina Farisatud Dzihniyah (2017)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Laporan Keuangan Perguruan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran Berdasarkan PSAK No.45	Kualitatif deskriptif	Perguruan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran hanya membuat satu laporan keuangan gabungan berbentuk jurnal harian yang memuat penerimaan dan pengeluaran kas dan disajikan setiap bulan. Laporan keuangannya belum berdasarkan PSAK 45.
10	Fina Ainur Rohmah (2018)	Rancangan Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Yanbi'ul 'Ulum Warramah (PPYUR) Kudus	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Laporan keuangan yang disajikan oleh Pondok Pesantren Yanbi'ul 'Ulum Warramah (PPYUR) Kudus hanya kas masuk dan kas keluar saja, belum menerapkan laporan keuangan yang berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP)

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi merupakan pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi, sistematis, dan berdasarkan standar yang berlaku umum (Bahri, 2016:2). Beberapa pengertian akuntansi menurut para ahli sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan proses identifikasi untuk membolehkan terdapat penilaian dan keputusan yang pasti dan tegas untuk yang menggunakan informasi tersebut” (Soemarno, 2004:5). Adapun menurut Kieso (2007:4) yang diterjemahkan oleh Handika dan Wasilah (2007), bahwa” Akuntansi yaitu system informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kondisi ekonomi dari organisasi untuk pengguna yang berkepentingan”.

Menurut *American Institut of Certfied Public Accounting* (AICPA) dalam Suhayati dan Anggadini (2009:1) “Akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi dan kejadian yang berbentuk keuangan dalam bentuk satuan uang dan menginterpretasikan hasil-hasilnya”.

Akuntansi didefinisikan juga sebagai pengetahuan yang mempelajari dalam penyediaan jasa, yang berupa informasi pada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan “(Pura, 2013:4).

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah informasi dari perusahaan berupa laporan keuangan yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi perusahaan tersebut.

### **2.2.2 Laporan Keuangan**

#### **2.2.2.1 Pengertian**

Bahri (2016:134) menjelaskan didalam bukunya mengenai laporan keuangan sebagai berikut “Laporan keuangan merupakan ringkasan dari pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas yang dibebankan oleh pemilik perusahaan”.

Menurut Pura (2013:11) “Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktivitas akuntansi, laporan ini mengikhtisarkan transaksi dalam bentuk yang digunakan sebagai pengambilan keputusan”.

Pengertian tentang laporan keuangan dijelaskan juga dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) per 2017, adalah:

“Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:1) “Laporan keuangan terdiri dari proses laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi akan penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Menurut Harahap (2009:105) “Laporan keuangan adalah penggambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

#### **2.2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) per 2018, tujuan laporan keuangan adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat untuk pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut”.

Menurut Martani dkk.,(2012: 33) menjelaskan dalam bukunya mengenai tujuan laporan keuangan adalah “menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan sebagai pengambil keputusan ekonomi”.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:3) “tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang memiliki manfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Sedangkan menurut Fahmi (2011:28) “tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi keuangan yang terdiri atas perubahan unsur-unsur laporan keuntungan kepada pihak berkepentingan dalam memberikan suatu penilaian kinerja keuangan terhadap perusahaan dan pihak manajemen perusahaan.

### **2.2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan (Pura, 2013:11). Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) per 2018 sudah dipaparkan mengenai standar kualitas yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Dapat dipahami

Laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan asumsi pengguna memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. Relevan

Informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

c. Materialitas

Informasi dipandang materialitas apabila informasi tersebut dapat mengubah pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan.

d. Keandalan

Informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari kesalahan material dan disajikan secara jujur.

e. Substansi mengungguli bentuk

Semua peristiwa dan transaksi disajikan secara keseluruhan sesuai dengan substansinya, realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

f. Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat adalah menggunakan unsur kehati-hatian dalam menilai dan menyajikan asset atau penghasilan tidak terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak terlalu rendah.

g. Kelengkapan

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Tidak terdapat informasi yang tidak benar yang tersajikan dalam laporan keuangan.

h. Dapat dibandingkan

Informasi akuntansi lebih bermanfaat apabila dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain yang sejenis dan untuk periode yang sama. Semua peristiwa disajikan secara konsisten dan laporan keuangan memberikan informasi yang lengkap tentang kebijakan akuntansi dan dampak dari kebijakan tersebut.

i. Tepat waktu

Laporan keuangan harus diproses dan dilaporkan dalam periode waktu yang cukup ekonomis, dengan mempertimbangkan jangka waktu pengambilan keputusan.

j. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

k. Informasi dari laporan keuangan harus memberikan manfaat melebihi dari biaya penyediaannya, akan tetapi bukan berarti pengguna informasi itu yang harus menanggung biaya.

#### **2.2.2.4 Unsur-Unsur Laporan Keuangan**

Unsur-unsur laporan keuangan dijelaskan dalam Standar Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) per 2018 yaitu: “posisi keuangan entitas terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

a. Asset adalah manfaat ekonomis masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

b. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomis masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain dimasa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

- c. Ekuitas adalah hak residual atau aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

Kinerja keuangan merupakan hubungan antara penghasilan dan beban dari suatu entitas sesuai yang disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- b. Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan asset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi pada penanam modal.

#### **2.2.2.5 Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan**

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) per 2018 sudah menjelaskan mengenai pengakuan unsur-unsur laporan keuangan, sebagai berikut:

“Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria yang diuraikan dalam paragraph 2.24 dan 2.25 sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas.
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal”.

Probabilitas manfaat ekonomi masa depan: “kriteria pengakuan mengacu pada ketidakpastian manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari dalam entitas. Pengkajian ketidakpastian pada arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan keuangan”.

Keandalan pengukuran: “kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Dalam banyak kasus, biaya atau nilai suatu pos diketahui. Dalam kasus lainnya biaya atau nilai tersebut harus diestimasi. Apabila estimasi yang layak tidak dapat dilakukan, maka pos tersebut diakui dalam neraca atau laporan laba rugi”.

Penjelasan di atas lebih diperinci lagi dalam poin selanjutnya di dalam SAK ETAP Per 2018, mengenai pengakuan dalam laporan keuangan yang isinya adalah:

- a. Aset: aset diakui dalam neraca apabila kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca apabila pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dilihat tidak mungkin mengalir dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.
- b. Kewajiban: kewajiban diakui dalam neraca apabila kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
- c. Penghasilan: pengakuan penghasilan adalah akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam pelaporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
- d. Beban: pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

### **2.2.2.6 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan**

Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan dirumuskan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Per 2018 sebagai berikut:

“Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur asset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan”.

Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK ETAP adalah biaya historis dan nilai wajar:

- a. Biaya historis suatu asset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh asset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari asset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadi kewajiban.
- b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk menukarkan suatu asset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.

### **2.2.3 Pondok Pesantren**

Menurut Madjid (2002:5) menjelaskan di dalam bukunya mengenai pondok pesantren sebagai berikut:

“Pondok pesantren berasal dari kata pondok dan pesantren, kata pondok yang asalnya dari bahasa arab ‘*funduq*’ yang artinya ialah tempat tinggal, dan pesantren berasal dari kata santri dan mendapat awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’ yang artinya yaitu tempat tinggal para santri yang mencari ilmu agama, pondok pesantren dapat disebut juga sebagai sistem pendidikan produk Indonesia, dan merupakan lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia”.

Dalam Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) Per 2018 diuraikan sebagai berikut:

“Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang sistemnya dalam bentuk asrama atau pondok, dan kyai adalah figure sentral, masjid untuk

pusat kegiatan, dan pengajaran agama Islam dibimbing oleh kyai yang harus diikuti para santri sebagai kegiatannya”. Pondok pesantren dapat juga diartikan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 mengklasifikasikan pondok pesantren menjadi 4 tipe, yaitu:

- a. Pondok Pesantren Tipe A, yaitu pondok pesantren dengan para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (system *wetonan* atau *sorogan*).
- b. Pondok Pesantren Tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.
- c. Pondok Pesantren Tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar (di madrasah atau sekolah umum lainnya), kyai hanya mengawasi dan sebagai pembina para santri tersebut.
- d. Pondok Pesantren Tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan system pondok pesantren dan sekaligus system sekolah atau madrasah.

Pengertian pondok pesantren sebagai suatu entitas pelaporan merupakan pondok pesantren yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan. Sebagai suatu entitas pelaporan, asset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dapat dibedakan dengan asset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan.

#### **2.2.4 Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP)**

Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), sebagai organisasi profesi akuntansi dan penyusun standar akuntansi keuangan di

Indonesia, bekerja sama dalam penyusunan suatu panduan pelaporan keuangan bagi pondok pesantren yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) yang diterbitkan bertepatan dengan kegiatan Indonesia *Shari'a Economic Festival* (ISEF) ke-4 di *Grand City Convention Center* Surabaya pada hari Rabu 08 November 2017 dan mulai efektif pada tanggal 28 Mei 2018. Pedoman ini dibuat dengan tujuan agar dapat menjadi panduan akuntansi yang mudah diterapkan oleh pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhitungkan sifat dan karakteristik pondok pesantren. Pedoman akuntansi pesantren ini diterapkan pada yayasan pondok pesantren dan bukan untuk diterapkan pada badan usaha yang berupa badan hukum tersendiri, seperti perseroan terbatas yang dimiliki oleh yayasan pondok pesantren.

Pedoman Akuntansi Pesantren ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI dan juga PSAK dan ISAK syariah yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi syariah IAI, jurnal yang digunakan pada pedoman akuntansi pesantren ini sifatnya tidak mengikat, pondok pesantren dapat membuat metode pencatatan dan pengakuan sesuai dengan sistemnya, asalkan hasil yang diperoleh sama. Transaksi pada pedoman akuntansi pesantren ini adalah transaksi umum yang terjadi di pondok pesantren, laporan keuangannya dibuat per tahunan dan apabila pondok pesantren tersebut baru berdiri, maka laporan keuangannya bias dibuat sesuai periode yang lebih pendek dari satu tahun (PAP, 2018:2).

#### **2.2.5 Penyajian Laporan Keuangan Pondok Pesantren menurut Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP)**

Menurut Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) per 2018 tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi

- b. Bentuk pertanggungjawaban pengurus yayasan pondok pesantren atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

#### **2.2.5.1 Konsistensi Penyajian dan Komponen Laporan Keuangan**

Pada Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) Per 2018 sudah memaparkan secara rinci bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari pondok pesantren, disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang harus diungkapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

Komponen laporan keuangan yang lengkap dan yang harus disusun oleh pondok pesantren sudah ditetapkan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) per 2018, sebagai berikut:

##### **1. Laporan posisi keuangan**

Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai asset, liabilitas, dan asset neto dari yayasan pondok pesantren, serta hubungan antar unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

- a. Asset disajikan berdasarkan karakteristiknya dan dikelompokkan menjadi asset lancar dan asset tidak lancar
- b. Liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya dan dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
- c. Asset neto disajikan menjadi asset neto tidak terikat, asset neto terikat temporer, dan asset neto terikat permanen.

##### **2. Laporan aktivitas**

Laporan aktivitas memberikan informasi mengenai kinerja keuangan yayasan pondok pesantren selama satu periode laporan tertentu. Laporan aktivitas menyajikan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat asset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

##### **3. Laporan arus kas**

Laporan arus kas menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dari yayasan pondok pesantren selama periode laporan

tertentu. Kas dan setara kas diklasifikasikan menjadi arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari operasi disajikan dengan metode tidak langsung.

#### 4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utama laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

#### **2.2.5.2 Kebijakan Akuntansi**

Dalam Pedoman Akuntansi pesantren (PAP) per 2018 telah dijelaskan secara rinci bahwa kebijakan akuntansi yayasan pondok pesantren harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material serta sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) belum mengatur secara spesifik masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka pengurus yayasan pondok pesantren harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang:

- a. Relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan
- b. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
  - 1) Menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari yayasan pondok pesantren
  - 2) Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya
  - 3) Netral, yaitu bebas dari keberpihakan
  - 4) Mencerminkan kehati-hatian
  - 5) Mencakup semua hal yang material.

Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, maka harus mempertimbangkan:

- a. Persyaratan dan panduan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berhubungan dengan hal yang serupa
- b. Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran asset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam konsep dan prinsip pervasive dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
- c. Persyaratan dan panduan dalam SAK yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait.

#### **2.2.5.3 Materialitis dan Periode Pelaporan**

Dalam yayasan pondok pesantren, penyajian laporan keuangan berdasarkan pada konsep materialitis. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan, atau kesalahan dalam mencatat, informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

Laporan keuangan yayasan pondok pesantren disajikan secara tahunan berdasarkan tahun hijriah atau masehi. Dalam hal yayasan pondok pesantren yang baru berdiri, maka laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun.

#### **2.2.5.4 Mata Uang Fungsional dan Pelaporan**

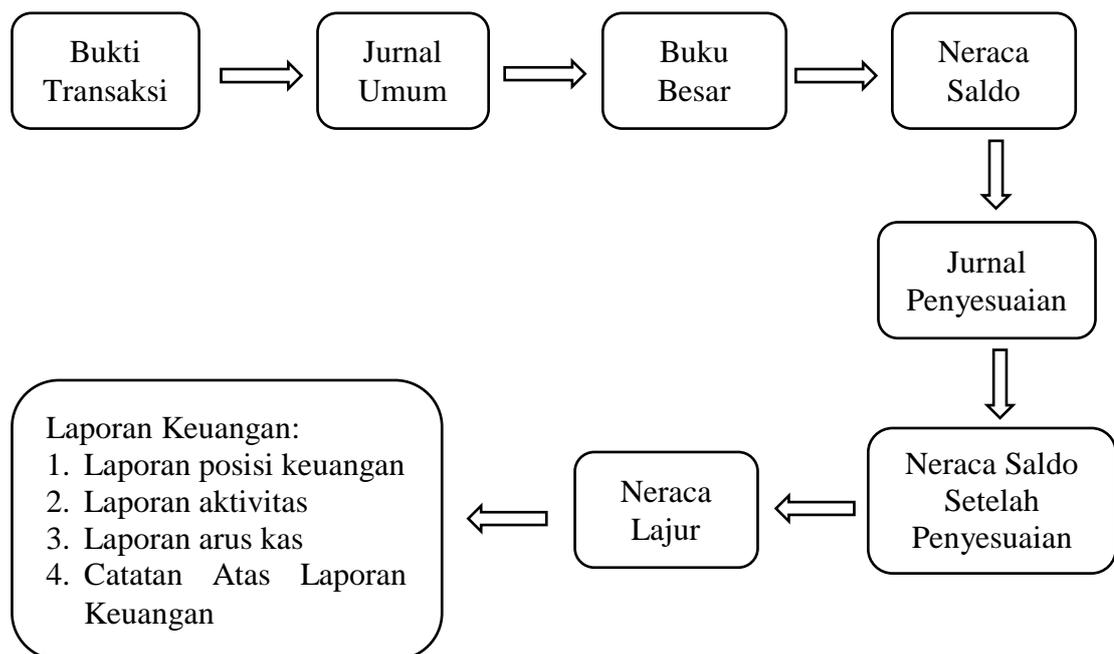
Mata uang fungsional dan pelaporan dari laporan keuangan yayasan pondok pesantren adalah rupiah. Yayasan pondok pesantren mencatat dan melaporkan setiap transaksi yang terjadi di yayasan pondok pesantren menggunakan mata uang rupiah. Pada transaksi yayasan pondok pesantren yang menggunakan mata uang selain rupiah (mata uang asing) dibukukan dengan menggunakan kurs transaksi. Saldo asset dan liabilitas dalam mata uang asing

dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

### 2.2.6 Siklus Akuntansi Pesantren

Siklus akuntansi pesantren merupakan tahapan-tahapan mulai dari awal terjadinya transaksi dalam pondok pesantren sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan tahap berikutnya (Bahri, 2016:18). Dibawah ini adalah siklus akuntansi pada pondok pesantren:

**Gambar 2.2.6**  
**Siklus Akuntansi Pesantren**



### 2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari perolehan data terhadap masalah yang ada dan landasan teori, serta agar dapat dilihat lebih jelasnya, maka peneliti menggambarkan kerangka berfikir teoritis yang dijelaskan dalam model penelitian seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.3  
Kerangka berfikir

